

Tantangan dan Optimalisasi Pengelolaan Dana BUMDes Mokopido Tahun 2021 di Desa Pangkung

Abd Kahar^{1*}; Sarnawia²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Madako Tolitoli

email : abd_kahar@umada.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mokopido di Desa Pangkung, Kabupaten Tolitoli, yang tidak beroperasi pada tahun 2021. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka teori pengelolaan keuangan dari Ahmad Yani yang mencakup tiga aspek: perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BUMDes belum optimal. Aspek perencanaan dinilai sudah cukup baik, di mana program usaha budidaya bawang merah telah dirancang sesuai dengan potensi desa. Namun, proses ini gagal pada tahap penganggaran, karena Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran untuk BUMDes pada tahun 2021 akibat realokasi dana untuk penanganan Bencana Darurat dan Mendesak Desa (COVID-19). Akibatnya, aspek pelaksanaan juga tidak tercapai karena tidak ada dana yang dapat dicairkan, sehingga BUMDes Mokopido tidak beroperasi sama sekali. Penelitian ini merekomendasikan perlunya komitmen pemerintah desa untuk memastikan alokasi anggaran dan implementasi program BUMDes guna menggerakkan perekonomian desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana; BUMDes; Desa Pangkung

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan fondasi utama dalam struktur pemerintahan di Indonesia, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus kebutuhannya sendiri. Salah satu instrumen kunci untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes didirikan dengan harapan dapat mendorong kontribusi nyata bagi pembangunan perekonomian lokal serta memberdayakan masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Ridwan, 2015; Sembiring, 2017; Adam et al., 2020). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. BUMDes didirikan untuk mengelola aset dan potensi desa guna menggerakkan perekonomian masyarakat. Keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada tata kelola keuangannya yang efektif. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (Sembiring, 2017; Anggraeni, 2016).

Menurut Ahmad Yani (2013), pengelolaan keuangan yang baik adalah sebuah proses sistematis yang mencakup tiga tahapan krusial: perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Ketiga aspek ini harus berjalan secara terintegrasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Perencanaan yang matang akan sia-sia tanpa adanya alokasi anggaran yang jelas, dan anggaran tidak akan bermakna jika tidak ada pelaksanaan program yang konkret. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes menghadapi tantangan dalam pengelolaannya. Salah satu contoh kasus adalah BUMDes Mokopido di Desa Pangkung, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. BUMDes ini didirikan sejak tahun 2017 dan sempat direvisi pada tahun 2020, tetapi tidak dapat beroperasi secara optimal. Pada tahun 2019, BUMDes ini pernah menjalankan usaha mebel dengan dana bantuan, namun program tersebut berhenti di tengah jalan akibat masalah internal pada pengurus dan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi. Meskipun pada tahun 2021 telah dirancang program baru di bidang pertanian, BUMDes Mokopido tetap tidak aktif karena belum adanya realisasi dana. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam siklus pengelolaan dana BUMDes tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengelolaan dana BUMDes Mokopido Tahun 2021 di Desa Pangkung ditinjau dari aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena pengelolaan dana BUMDes Mokopido. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk meneliti objek pada kondisi alamiahnya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data (Moleong, 2017). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pangkung, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan topik penelitian (Sugiyono, 2018). Informan terdiri dari 7 orang, meliputi Kepala Desa sebagai informan kunci, perangkat desa, serta jajaran pengurus BUMDes Mokopido. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer maupun sekunder (Creswell, 2014). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pada bagian ini membedah temuan lapangan mengenai pengelolaan dana BUMDes Mokopido secara sistematis berdasarkan tiga aspek teori pengelolaan keuangan oleh Ahmad Yani (2013): perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Keterkaitan antara temuan empiris dan kerangka teoritis ini diuraikan untuk membangun argumentasi yang koheren mengenai penyebab tidak optimalnya kinerja BUMDes di Desa Pangkung.

1. Perencanaan; fondasi yang solid namun rapuh

Menurut kerangka teori Ahmad Yani, perencanaan merupakan tahap fundamental di mana tujuan organisasi ditentukan dan rincian kegiatan dirumuskan secara matang untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap ini menuntut adanya proses pemikiran yang logis dan strategis. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa BUMDes Mokopido secara substantif telah memenuhi aspek ini. Setelah kegagalan program sebelumnya, pengurus yang telah direvisi berhasil merumuskan rencana usaha baru, yaitu budidaya bawang merah. Pilihan ini tidak dibuat secara acak, melainkan didasarkan pada analisis potensi desa yang agraris dan keberadaan sumber daya manusia (salah

satu anggota) yang telah berpengalaman di bidang tersebut. Rencana ini bahkan telah dituangkan secara detail dalam sebuah proposal yang mencakup rincian kebutuhan anggaran sebesar Rp.50.000.000. Kesesuaian antara program yang direncanakan dengan potensi lokal ini secara teoretis merupakan wujud perencanaan yang baik. Dengan demikian, BUMDes Mokopido telah berhasil membangun fondasi awal yang solid untuk siklus pengelolaan dana. Namun, keberhasilan pada tahap ini menjadi fondasi yang rapuh karena sangat bergantung pada realisasi tahap selanjutnya (Bryson, 2018).

2. Penganggaran; mata rantai yang hilang dalam siklus pengelolaan

Penganggaran, dalam teori Ahmad Yani, adalah proses vital yang menjembatani perencanaan dengan pelaksanaan melalui persiapan dan alokasi dana secara konkret. Tanpa penganggaran, perencanaan hanya akan menjadi dokumen statis. Di sinilah letak masalah utama yang dihadapi BUMDes Mokopido. Temuan lapangan secara tegas menunjukkan bahwa aspek penganggaran tidak terpenuhi sama sekali. Ketiadaan dukungan anggaran telah membuat BumDes tidak dapat beroperasi (Sumardi, 2010). Pemerintah Desa Pangkung, sebagai pemegang otoritas anggaran, tidak mengalokasikan penyertaan modal dari APBDes pada tahun 2021 untuk BUMDes. Alasan yang dikemukakan adalah adanya realokasi anggaran untuk prioritas lain, yaitu penanganan Bencana Darurat dan Mendesak Desa terkait pandemi covid-19, khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keputusan ini, meskipun dapat dipahami dari sisi kedaruratan, secara langsung mematahkan siklus pengelolaan yang ideal menurut teori. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes belum diposisikan sebagai program prioritas yang esensial untuk pembangunan ekonomi desa, melainkan sebagai program yang dapat ditunda. Kegagalan dalam mengalokasikan dana untuk BumDes Mokopido telah menyebabkan ketidakberfungsiannya, meskipun terdapat dokumen perencanaan (Holmberg-Wright, 1982).

3. Pelaksanaan; konsekuensi logis dari kegagalan penganggaran

Aspek terakhir dalam teori Ahmad Yani adalah pelaksanaan, yaitu realisasi dari semua kegiatan yang telah direncanakan dengan menggunakan anggaran yang telah dipersiapkan. Secara teoretis, pelaksanaan tidak dapat berdiri sendiri; ia merupakan fungsi turunan dari perencanaan dan penganggaran. Temuan penelitian secara konsisten mengonfirmasi hal ini. Program budidaya bawang merah yang telah direncanakan oleh BUMDes Mokopido tidak pernah terlaksana. Pelaksanaan mustahil dilakukan tanpa adanya sumber daya (dana) yang telah dianggarkan. Karena tidak ada anggaran yang dialokasikan, maka tidak ada dana yang bisa dicairkan untuk membeli bibit, peralatan, atau membayar tenaga kerja. BUMDes secara efektif tidak memiliki modal operasional sama sekali, karena kebijakan saja tidak signifikan mempengaruhi kinerja keuangan tanpa dukungan anggaran yang memadai (Pongayo et al., 2024). Janji pemerintah desa untuk menganggarkan dana pada tahun 2023 semakin menegaskan bahwa pada periode penelitian (tahun 2021), aspek pelaksanaan memang tidak tercapai. Dengan demikian, status non-operasional BUMDes Mokopido bukanlah kegagalan pada tahap pelaksanaan itu sendiri, melainkan konsekuensi logis dan tak terhindarkan dari kegagalan pada tahap penganggaran. Hal ini membuktikan validitas model sekuensial dalam teori pengelolaan keuangan yang digunakan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana BUMDes Mokopido Tahun 2021 di Desa Pangkung belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh terputusnya siklus pengelolaan pada tahap krusial. Dari tiga aspek yang diteliti, hanya aspek perencanaan yang terpenuhi dengan baik, ditandai oleh adanya program kerja yang sesuai dengan potensi desa. Namun, aspek penganggaran dan pelaksanaan tidak terpenuhi sama sekali. Kegagalan penganggaran, yang disebabkan oleh realokasi dana desa untuk

penanganan pandemi, menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak adanya pelaksanaan program. Akibatnya, BUMDes Mokopido menjadi lembaga yang pasif dan belum mampu berkontribusi pada perekonomian desa. Temuan ini menggarisbawahi bahwa perencanaan yang baik tidak akan berarti tanpa adanya komitmen anggaran dan eksekusi yang nyata dari pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H., Ristawati, R., Ramadhanti, S., & Nugraha, X. (2020). *Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.3414>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations: A Guide To Strengthening And Sustaining Organizational Achievement*. John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Holmberg-Wright, K. (1982). The Budget As A Planning Instrument. *New Directions For Adult And Continuing Education*, 1982(16), 23–39. <https://doi.org/10.1002/ACE.36719821604>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pongayo, A., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2024). *The Influence of Implementation and Financial Management on Village Financial Performance (A Study in the Villages of Lolayan Subdistrict, Bolaang Mongondow Regency)*. 1(4), 92–104. <https://doi.org/10.62872/aprzcp56>
- Ridlwan, Z. (2015). *Payung Hukum Pembentukan Bumdes*. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>
- Sembiring, S. (2017). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. *Kertha Patrika*, 39(01), 16. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p02>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumardi, S. (2010). Keterkaitan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(1). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/download/1840/1748>
- Yani, Ahmad. (2013). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.